

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN *BULLYING* DI SMP NEGERI 13 JAYAPURA PAPUA

SALOMO SADA¹⁾, YULIUS MATAPUTUN²⁾, ETTY OCTAVIANI MANALU³⁾*

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan, Universitas Cenderawasih, Jayapura
email: sadasalomo667@gmail.com¹⁾, yuliusmataputun1965@gmail.com²⁾,
ettyoctavianimanalu@fkip.uncen.ac.id³⁾

*)Korespondensi: ettyoctavianimanalu@fkip.uncen.ac.id

Naskah diterima: 02 Agustus 2025 - disetujui: 30 September 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam pencegahan *bullying* pada peserta didik di SMP Negeri 13 Kota Jayapura, Papua. Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan mendukung serta bebas dari tindakan kekerasan. Melalui penelitian ini, kinerja kepala sekolah dianalisis berdasarkan indikator utama, yaitu sebagai berikut: Peran Kepala Sekolah sebagai Perencana dan Pengorganisir dalam Pencegahan Kebijakan Anti-Bullying; Manajer dalam Program Anti-Bullying; dan Fasilitator dan Motivator dalam Pencegahan *Bullying*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif meliputi teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak terkait di SMP Negeri 13 Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah telah berupaya optimal dalam menjalankan tiga peran tersebut meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian warga sekolah, serta budaya permisif terhadap perilaku *bullying*. Namun demikian, strategi pencegahan yang diterapkan melalui kebijakan sekolah, program pembinaan karakter, pembentukan tim anti-*bullying*, dan pelibatan orang tua dianggap efektif dalam menurunkan angka kasus *bullying*. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peran kepala sekolah sebagai agen perubahan budaya sekolah sangat penting untuk menciptakan iklim pendidikan yang inklusif dan humanis.

Kata kunci: Kepala sekolah; *bullying*; pencegahan; peran kepemimpinan

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the role of the principal in preventing bullying among students at SMP Negeri 13, Jayapura City, Papua. The principal has a strategic role as a leader in the world of education who not only focuses on administrative aspects but also creates a safe, peaceful, and supportive school environment that is free from acts of violence. Through this study, the performance of the principal is analyzed based on the following main indicators: The Role of the Principal as a Planner and Organizer in Preventing Anti-Bullying Policies; Manager in Anti-Bullying Programs; and Facilitator and Motivator in Preventing Bullying. The research method used is descriptive qualitative. The qualitative approach includes data collection techniques such as observation, documentation, and interviews. The research subjects include the principal, teachers, students, and related parties at SMP Negeri 13, Jayapura City. The results of the study indicate that the principal has made optimal efforts in carrying out these three roles despite challenges such as limited resources, low awareness of some school members, and a permissive culture towards bullying behavior. However, prevention strategies implemented through school policies, character-building programs, the formation of anti-bullying teams, and parental involvement are considered effective in reducing bullying cases. This research implies that the principal's role as an agent of change in school culture is crucial for creating an inclusive and humane educational climate.

Keywords: Principal; *bullying*; prevention; leadership roles

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal. Melalui pendidikan, manusia memperoleh pengetahuan, membentuk sikap, serta mengembangkan nilai dan perilaku yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sering dipandang sebagai sarana yang efektif dalam menumbuhkan kecerdasan, membentuk karakter, serta mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraannya, keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peran berbagai pihak di lingkungan sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pemimpin utama dalam mengelola dan mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan mendukung perkembangan peserta didik. Dalam konteks manajerial dan kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin, manajer, inovator, supervisor, motivator, fasilitator, mediator, serta agen perubahan sosial yang mampu membangun budaya sekolah yang positif dan kondusif bagi proses pembelajaran.

Kepala Sekolah Sebagai pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab untuk

mendorong kemajuan sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun budaya kerja yang produktif di lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga berperan dalam mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan agar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Selain itu, guru sebagai pendidik memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai moral, etika, disiplin, serta budaya belajar yang positif. Dengan demikian, kepala sekolah diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dan pelayanan publik dalam lingkungan pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun hilangnya kesempatan belajar bagi peserta didik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai

bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang harus mampu menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan bagi setiap peserta didik.

Meskipun demikian, dalam praktiknya sekolah masih sering menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah bullying atau perundungan. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik dalam bentuk kekerasan fisik, ejekan verbal, pengucilan sosial, maupun melalui media digital yang dikenal sebagai cyberbullying. Fenomena bullying di sekolah telah menjadi masalah yang memprihatinkan karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar, menurunkan rasa percaya diri siswa, serta merusak iklim belajar di sekolah. Laporan dari UNESCO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kejadian perundungan di sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialami karena rasa takut, malu, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan yang ada di sekolah.

Peran kepala sekolah dalam Kondisi tersebut, sebagai pemimpin pendidikan menjadi sangat penting dalam

menginisiasi serta mengarahkan berbagai upaya pencegahan bullying secara sistematis. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, membangun budaya sekolah yang positif, serta mengoordinasikan kerja sama antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kepala sekolah dalam mendengarkan keluhan siswa, memberikan sanksi edukatif kepada pelaku, serta membangun kerja sama dengan guru bimbingan konseling dapat membantu menekan angka kejadian bullying di sekolah. Selain itu, program psikoedukasi yang melibatkan guru dan orang tua juga dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap bahaya bullying.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang telah dilakukan masih lebih banyak menyoroti dampak bullying terhadap siswa atau peran guru dan layanan bimbingan konseling dalam penanganannya. Kajian yang secara khusus meneliti bagaimana kepala sekolah menjalankan peran kepemimpinannya secara komprehensif dalam upaya pencegahan bullying di tingkat satuan pendidikan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai implementasi peran kepala sekolah dalam pencegahan bullying juga masih jarang dilakukan pada sekolah yang memiliki latar belakang sosial

dan budaya yang beragam, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur seperti Kota Jayapura. Padahal, setiap lingkungan sekolah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda yang dapat memengaruhi dinamika serta strategi pencegahan bullying.

Berdasarkan kondisi tersebut, bullying masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius di lingkungan pendidikan, termasuk di SMP Negeri 13 Kota Jayapura yang memiliki keragaman latar belakang sosial dan budaya siswa. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Dwi Nurhayati (2021), kepala sekolah seharusnya menjalankan berbagai peran strategis dalam upaya pencegahan bullying, antara lain sebagai perencana dan pengorganisir kebijakan anti-bullying, manajer program, fasilitator dan motivator, pendidik sekaligus teladan perilaku positif, pengawas lingkungan sekolah, penghubung dengan orang tua dan masyarakat, penyedia saluran pelaporan yang aman, evaluator kebijakan, serta pengembang budaya sekolah yang positif. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan peran-peran tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi keterbatasan sumber daya, tingkat kesadaran warga sekolah, maupun faktor budaya yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bebas dari bullying.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih

mendalam bagaimana kepala sekolah di SMP Negeri 13 Kota Jayapura menjalankan peran-peran strategisnya dalam upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan kepala sekolah, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran kepala sekolah dalam pencegahan bullying, sekaligus menjadi referensi bagi satuan pendidikan lainnya dalam membangun budaya sekolah yang aman, humanis, dan bebas dari kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif untuk mengkaji secara mendalam peran kepala sekolah dalam pencegahan perilaku *bullying* di SMP Negeri 13 Kota Jayapura sebagai lokus penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan, strategi, serta implementasi program yang dilakukan kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah sebagai informan kunci, tiga orang guru yaitu guru bimbingan konseling, guru agama, dan guru piket, serta dua orang siswa kelas VIII yang

dipilih menggunakan teknik snowball sampling berdasarkan rekomendasi informan awal. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi yang disusun sesuai dengan fokus penelitian untuk memandu proses pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi moderat dengan keterlibatan terbatas peneliti dalam aktivitas sekolah, wawancara mendalam untuk menggali informasi secara komprehensif, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi sekolah guna memperkuat dan memverifikasi temuan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola serta tema yang muncul sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Kepala Sekolah sebagai Perencana dan Pengorganisir dalam Pencegahan Kebijakan Anti-Bullying

Penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Jayapura menunjukkan bahwa kepala sekolah menjalankan fungsi perencanaan dan pengorganisasian kebijakan anti-bullying melalui tiga indikator utama, yaitu penyusunan visi dan misi sekolah anti-kekerasan, pembentukan tim anti-bullying, serta penetapan kebijakan dan SOP penanganan.

1. Menyusun visi dan misi sekolah anti kekerasan

Kepala sekolah menegaskan bahwa nilai-nilai anti-kekerasan diintegrasikan dalam visi dan misi sekolah sebagai fondasi budaya damai. Ia menyatakan, *“Saya meninjau ulang visi dan misi sekolah dengan menambahkan nilai-nilai seperti keterbukaan, keadilan, dan keamanan. Kami melibatkan guru dan komite sekolah agar nilai anti-kekerasan bukan hanya tertulis, tetapi benar-benar menjadi komitmen bersama.”* (In.1). Guru BK menguatkan bahwa visi tersebut menjadi landasan program pembinaan, *“Dengan adanya visi tersebut, saya merasa punya landasan kuat untuk mengajak siswa menjunjung nilai empati dan keberanian menolak kekerasan.”* (In.2). Guru piket dan guru agama juga menyelaraskan peran mereka dengan visi sekolah, sementara siswa menyatakan, *“Kepala sekolah bilang sekolah ini harus aman buat semua, jadi kami tahu bullying itu dilarang keras.”* (In.5). Temuan ini menunjukkan bahwa visi dan misi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi arah kolektif dalam membangun budaya anti-bullying.

2. Membentuk tim anti bullying serta menetapkan kebijakan dan SOP

Kepala sekolah membentuk tim yang melibatkan guru BK, wali kelas, guru piket, perwakilan siswa, dan orang tua. Ia menjelaskan, *“Kami membentuk tim yang terdiri dari guru BK, wali kelas, guru piket, perwakilan siswa, dan orang tua. Tim ini aktif dalam penyuluhan, menerima laporan,*

hingga menyusun program edukasi.” (In.1). Guru BK menambahkan, *“Kami menerima laporan, melakukan asesmen awal, dan menyusun strategi intervensi.”* (In.2), sedangkan guru piket menegaskan peran pengawasan di titik rawan (In.3). Kebijakan internal dan SOP juga disusun secara partisipatif. Kepala sekolah menyatakan, *“Kebijakan internal memuat definisi bullying, jenis-jenisnya, prosedur pelaporan, sanksi, dan perlindungan bagi korban.”* (In.1). Terkait SOP, ia menambahkan, *“SOP kami susun secara rinci mulai dari tahap laporan awal, investigasi, mediasi, hingga pemulihan.”* (In.1). Siswa mengakui adanya mekanisme jelas, *“Kalau ada yang melapor, biasanya langsung ditindak... kami merasa lebih aman.”* (In.5). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah mengorganisasi sistem pencegahan dan penanganan secara terstruktur dan kolaboratif.

Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Program Anti-Bullying

Sebagai manajer, kepala sekolah menjalankan fungsi perencanaan program, pengorganisasian tugas, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

1. Perencanaan dan pengorganisasian program

Kepala sekolah menyampaikan bahwa program dirancang secara preventif meskipun belum terdapat kasus serius. Ia menuturkan, *“Kami menyusun rencana program anti-bullying sebagai bagian dari visi jangka panjang sekolah... tindakan*

preventif jauh lebih efektif daripada penanganan setelah kejadian.” (In.1). Guru BK menambahkan bahwa perencanaan berbasis hasil observasi sosial dan konseling (In.2), sedangkan guru piket memberi masukan terkait area rawan (In.3). Pengorganisasian tugas dilakukan melalui pembagian peran yang jelas. Guru BK menjelaskan, *“Saya ditunjuk sebagai koordinator tim... mekanisme pelaporan kami buat sesederhana mungkin.”* (In.2). Siswa menyatakan bahwa pembagian tugas membuat mereka tahu ke mana harus melapor (In.5).

2. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program

Pelaksanaan kegiatan diwujudkan melalui integrasi nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran, kampanye, dan kegiatan OSIS. Kepala sekolah menegaskan, *“Kami secara konsisten memasukkan nilai-nilai anti-kekerasan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.”* (In.1). Guru BK melaksanakan bimbingan kelompok dan kampanye kreatif (In.2), sementara guru piket membangun dialog informal dengan siswa (In.3). Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan guru. Kepala sekolah menyatakan, *“Setiap bulan saya meminta rekap pengamatan dari guru piket dan laporan insiden dari wali kelas.”* (In.1). Evaluasi dilakukan tiap semester melalui survei kenyamanan belajar dan rapat refleksi. Ia menambahkan, *“Evaluasi rutin tetap menjadi komponen penting dalam membangun lingkungan sekolah yang bebas kekerasan.”* (In.1). Guru BK

menguatkan bahwa evaluasi membantu deteksi dini dan perbaikan program (In.2). Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi manajerial berjalan sistematis dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut.

Peran Kepala Sekolah sebagai Fasilitator dan Motivator dalam Pencegahan Bullying

Peran fasilitator dan motivator tercermin melalui pembangunan komunikasi terbuka, pemberian dukungan kepada siswa, pelibatan aktif warga sekolah, serta penyediaan fasilitas konseling.

1. Membangun komunikasi dan memberikan dukungan

Kepala sekolah memposisikan diri sebagai penghubung antarwarga sekolah. Ia menyatakan, *“Saya memastikan setiap laporan ditanggapi dengan serius dan membuka kanal komunikasi langsung agar siapa pun bisa menyampaikan keluhan tanpa rasa takut.”* (In.1). Guru BK menilai kepala sekolah aktif menjembatani komunikasi siswa, guru, dan orang tua (In.2). Siswa merasakan keterbukaan tersebut, *“Kami bisa menyampaikan masalah apapun, termasuk soal bullying.”* (In.5). Dukungan moral juga diberikan agar siswa berani melapor. Siswa mengungkapkan, *“Kepala sekolah selalu bilang kalau kita merasa tidak nyaman, kita tidak boleh diam.”* (In.5). Guru BK menambahkan adanya kotak pengaduan rahasia dan mekanisme ramah anak (In.2).

2. Mendorong keterlibatan dan menyediakan fasilitas konseling

Kepala sekolah melibatkan guru dan siswa dalam berbagai program kreatif. Ia menyampaikan, *“Saya percaya program anti-bullying akan berhasil jika guru dan siswa merasa terlibat dan memiliki peran di dalamnya.”* (In.1). Guru BK menyebut program seperti *Peer Counselor* dan kampanye bersama OSIS (In.2), sedangkan guru piket menilai program menjadi gerakan bersama (In.3). Fasilitas konseling juga disediakan secara memadai. Kepala sekolah menjelaskan, *“Kami telah menyiapkan ruang konseling yang bersifat privat dan nyaman... serta bekerja sama dengan psikolog luar sekolah.”* (In.1). Guru BK menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan layanan konseling (In.2), dan siswa menyatakan, *“Ada ruang BK yang bisa dikunjungi kapan saja... kami merasa dihargai.”* (In.5).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah telah menjalankan peran sebagai perencana, manajer, fasilitator, dan motivator secara terpadu dalam pencegahan *bullying*, dengan menekankan nilai-nilai anti-kekerasan sebagai fondasi budaya sekolah yang aman dan kondusif.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada tiga peran kepala sekolah dalam pencegahan *bullying* yang ditemukan di SMP Negeri 13 Kota Jayapura dan dianalisis berdasarkan teori kepemimpinan pendidikan dari E. Mulyasa (2013), Dwi Nurhayati dkk. (2021), Dan

Olweus (1993), dan Joyce L. Epstein (2011), serta diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya. Analisis tidak hanya berfokus pada kesesuaian antara temuan dan teori, tetapi juga mengkaji ketegangan antara konsep ideal dalam teori kepemimpinan pendidikan dengan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan struktural di Kota Jayapura, Papua. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menjelaskan efektivitas peran kepala sekolah, tetapi juga menggambarkan tantangan nyata yang memengaruhi implementasi kebijakan pencegahan bullying di lingkungan sekolah.

Peran Kepala Sekolah sebagai Perencana dan Pengorganisir dalam Kebijakan Anti-Bullying

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan aktif dalam merumuskan visi dan misi sekolah yang mengintegrasikan nilai anti-kekerasan, membentuk tim anti-bullying, menyusun kebijakan internal, serta menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kasus. Temuan ini sejalan dengan pandangan E. Mulyasa (2013) yang menegaskan bahwa kepala sekolah merupakan pemimpin strategis yang bertanggung jawab merancang arah kebijakan sekolah agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan kondusif. Dalam perspektif teori kepemimpinan pendidikan, visi dan misi sekolah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku seluruh warga sekolah untuk

menciptakan lingkungan belajar yang aman. Namun demikian, terdapat ketegangan antara konsep ideal dalam teori dengan realitas praktik di lapangan. Secara teoritis, kebijakan anti-bullying dapat dirancang secara sistematis dan diterapkan secara konsisten. Akan tetapi, dalam konteks sekolah di Papua, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan secara linear karena dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pendukung, serta dinamika sosial masyarakat sekitar sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perencanaan, tetapi juga pada kemampuan kepala sekolah menyesuaikan kebijakan dengan realitas lokal.

Keterlibatan guru, komite sekolah, dan orang tua dalam penyusunan kebijakan juga mencerminkan pendekatan partisipatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), yang menyatakan bahwa kebijakan yang disusun secara kolaboratif cenderung lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh seluruh pihak. Dalam konteks budaya lokal Papua, pendekatan kolektif ini memiliki makna yang lebih luas karena masyarakat cenderung menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan hubungan sosial yang kuat. Dengan demikian, pelibatan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan,

tetapi juga menyesuaikannya dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, penyusunan SOP penanganan kasus bullying memperkuat sistem perlindungan siswa. Joyce L. Epstein (2011) menekankan bahwa sistem yang jelas dan terstruktur mampu meningkatkan kepercayaan siswa terhadap mekanisme perlindungan sekolah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan SOP, terutama ketika kasus bullying melibatkan relasi sosial yang kompleks antar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SOP saja belum cukup; diperlukan pula kepemimpinan yang sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya siswa.

Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Program Anti-Bullying

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah menjalankan fungsi manajerial melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program anti-bullying secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pandangan E. Mulyasa (2013) yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses terarah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Implementasi program anti-bullying yang bersifat preventif menunjukkan adanya upaya kepala sekolah untuk mengantisipasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi perilaku perundungan yang serius.

Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, keberhasilan manajemen program tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai tantangan struktural yang dihadapi sekolah di Papua. Kondisi geografis, keterbatasan akses terhadap pelatihan profesional bagi guru, serta minimnya dukungan layanan psikologis di beberapa wilayah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara model manajemen pendidikan yang ideal dalam teori dengan realitas penyelenggaraan pendidikan di daerah dengan sumber daya terbatas.

Keterlibatan berbagai pihak seperti guru bimbingan konseling, wali kelas, guru piket, serta siswa dalam pelaksanaan program anti-bullying menunjukkan adanya koordinasi yang terstruktur. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif kepala sekolah berkontribusi terhadap keberhasilan program pencegahan bullying. Monitoring yang dilakukan secara rutin memungkinkan deteksi dini terhadap potensi konflik antar siswa sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.

Selain itu, komunikasi yang terbangun antara sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Joyce L. Epstein (2011) menekankan bahwa kemitraan antara sekolah dan keluarga merupakan elemen penting dalam menyelesaikan

permasalahan sosial siswa. Dalam konteks masyarakat Papua yang memiliki struktur sosial komunal, keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan sekolah. Namun, tantangan muncul ketika latar belakang sosial dan ekonomi keluarga siswa berbeda-beda sehingga tingkat partisipasi orang tua tidak selalu merata.

Peran Kepala Sekolah sebagai Fasilitator dan Motivator dalam Pencegahan Bullying

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong terciptanya iklim sekolah yang suportif. Kepala sekolah berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar warga sekolah, memberikan motivasi kepada guru dan siswa, serta menyediakan fasilitas konseling bagi siswa yang mengalami permasalahan sosial. Dalam perspektif teori pencegahan bullying, Dan Olweus (1993) menegaskan bahwa dukungan emosional dari pihak sekolah merupakan faktor penting dalam mendorong siswa untuk melaporkan tindakan bullying.

Temuan bahwa siswa merasa aman untuk menyampaikan masalah menunjukkan bahwa kepala sekolah berhasil membangun iklim psikologis yang relatif terbuka. Namun, jika dianalisis secara lebih kritis, rasa aman tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan sekolah, tetapi juga oleh dinamika budaya lokal yang menekankan nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Dalam masyarakat

Papua, hubungan sosial sering kali dibangun melalui kedekatan emosional dan rasa kebersamaan, sehingga pendekatan yang bersifat dialogis dan persuasif cenderung lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Di sisi lain, faktor budaya juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam penanganan bullying. Dalam beberapa kasus, konflik antar siswa dapat dipengaruhi oleh latar belakang kelompok sosial atau identitas komunitas tertentu. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memiliki sensitivitas budaya dalam menangani konflik agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas. Penyediaan ruang konseling yang nyaman dan privat juga menunjukkan perhatian sekolah terhadap aspek kesejahteraan psikologis siswa. Fasilitas tersebut memungkinkan siswa untuk menyampaikan permasalahan yang mereka alami secara lebih terbuka. Namun, dalam konteks sekolah di Papua, keterbatasan tenaga konselor profesional sering kali menjadi tantangan dalam memberikan layanan konseling yang optimal. Kondisi ini menuntut kepala sekolah untuk memaksimalkan peran guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan dukungan emosional kepada siswa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dalam pencegahan *bullying* di SMP Negeri 13 Kota Jayapura berjalan secara integratif melalui fungsi

perencanaan, manajemen program, serta fasilitasi dan motivasi bagi warga sekolah. Peran sebagai perencana memberikan landasan kebijakan yang jelas, peran sebagai manajer memastikan implementasi program berjalan secara sistematis, sedangkan peran sebagai fasilitator dan motivator memperkuat aspek psikologis dan partisipatif dalam pencegahan *bullying*.

Namun demikian, analisis kritis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan budaya yang khas di Papua. Faktor keterbatasan sumber daya, dinamika sosial masyarakat, serta pengaruh nilai-nilai budaya lokal menjadi variabel penting yang memengaruhi praktik kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian, efektivitas pencegahan *bullying* tidak hanya ditentukan oleh penerapan teori kepemimpinan pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan kepala sekolah dalam menyesuaikan kebijakan dan strategi kepemimpinannya dengan konteks sosial dan budaya lokal sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Jayapura dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah telah menjalankan peran secara efektif dalam pencegahan *bullying* sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengidentifikasi dan menganalisis peran kepala sekolah dalam menciptakan

lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Kepala sekolah berperan sebagai perencana dan pengorganisir melalui penyusunan visi dan misi anti-kekerasan, pembentukan tim, serta penetapan kebijakan dan SOP yang jelas; sebagai manajer melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program secara sistematis; serta sebagai fasilitator dan motivator dengan membangun komunikasi terbuka, mendorong partisipasi warga sekolah, dan menyediakan layanan konseling yang mendukung keberanian siswa untuk melapor. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang partisipatif, terstruktur, dan berorientasi pada pencegahan mampu membangun budaya sekolah yang kondusif dan responsif terhadap potensi perundungan. Secara logis, keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, kolaborasi antarwarga sekolah, dan dukungan psikologis yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen program anti-*bullying* serta perlunya evaluasi berkala dan pengembangan inovasi program berbasis kebutuhan siswa agar upaya pencegahan dapat berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

DBE Support Program. (2012). *Addressing bullying in schools: Guidelines for school leaders and teachers*. USAID

- DBE Program Indonesia.
- Dzikrulloh. (2023). Peran kepala sekolah dalam pengembangan program psikoedukasi berbasis nilai moral Islami untuk pencegahan *bullying* di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Karakter*, 5(2), 123–135.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Westview Press.
- Manalu, E. O., Mataputun, Y., & Budiarti, I.S. (2025). Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan: Sebuah Studi Kualitatif. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 5(1), 37–50.
<https://doi.org/10.30872/jiimpian.v5i1.4678>
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi kepala sekolah profesional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2020). Kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam implementasi program anti-bullying di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(2), 145–156.
- Nurhayati, S., dkk. (2021). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan inklusif. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 55–67.
- Nurhayati, D. (2021). Peran strategis kepala sekolah dalam pencegahan bullying di lingkungan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 45–58.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell Publishing.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Usman, H. (2019). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- UNESCO. (2023). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Wahyudi. (2020). Kepemimpinan kepala sekolah dalam menurunkan tingkat perundungan di sekolah menengah pertama. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengelolaan Sekolah*, 4(1), 67–79.
- Wahyuni. (2023). Kolaborasi kepala sekolah dan guru bimbingan konseling dalam pemulihan psikologis korban bullying. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 8(1), 88–101.
- Wulandari, R., & Mulyana, A. (2022). Kebijakan sekolah dalam pencegahan *bullying* untuk membentuk lingkungan belajar yang kondusif. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 78–90.